

URGENSI PENDIDIKAN INTEGRATIF- NONDIKOTOMIK DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Akh. Syaiful Rijal

Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan

Pos-el: akhsyaifulrijal@ymail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang perubahan konsep, institusi/kelembagaan, dan perubahan budaya pendidikan setelah berubah dari IAIN/STAIN menjadi UIN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konsep pada UIN adalah merealisasikan gagasan tentang integrasi ilmu dan mengakhiri perdebatan wacana dikotomi ilmu. UIN Jakarta menggunakan paradigma integrasi ilmu dialogis dari Ian G. Barbour. UIN Malang memilih pendekatan Imam al-Ghazali dengan metode “takwil” dari ilmu-ilmu sosial. Bentuk realisasi dari konsep integrasi adalah menampung universalitas ilmu dalam Islam yang tidak mengenal dikotomi ilmu. Budaya pendidikan yang dikembangkan disesuaikan dengan budaya universitas, berwawasan riset, publikasi hasil penelitian dan lain-lain.

Kata Kunci: Perubahan, konsep, institusi, budaya.

Abstract: This article discuss about the alteration of concept, institution, and education culture after the changing from IAIN/STAIN to UIN. The result of research showed that The concept of transformation exactly is to realize the concept of the science integration and to stop the discourse controversion of knowledge dichotomy. UIN Jakarta adopts the paradigm of dialogical science integration formulated by Ian G. Barbour. Meanwhile, UIN Malang more adopted Imam al-Ghazali’s approach, by using “takwil” adopted from social science. The realization of integration concept is to accommodate the universality of Science in islamic that has no dichotomy. (3) The Educacional culture being developed should be adjusted to the academic culture of university, manifested in researches, publication of research, etc.

Keywords: Transformation, concept, institution, culture

Pendahuluan

Kajian-kajian tentang pendidikan tinggi Islam dalam sejarah sudah banyak dilakukan oleh beberapa cendekiawan baik yang bersifat historis, konseptual maupun kelembagaan/institusional. Dalam perspektif sejarah, keberadaan universitas atau pendidikan tinggi Islam agak sulit dilacak karena banyak terjadi kontroversial. Artinya ada multi perspektif historis yang bermunculan. Salah satunya adalah kajian M. Enoch Markum¹ yang menyatakan bahwa secara historis yang tercatat sebagai perguruan tinggi tertua di dunia adalah Universitas Al-Azhar (berdiri tahun 988), Universitas Paris (1167) dan Universitas Oxford (1176). Pernyataan Markum ini agak bertentangan dengan kajian Standwood Cobb² yang menyatakan bahwa universitas pertama di dunia didirikan oleh kaum muslimin pada abad kesembilan, pertama di Bagdad dan menyusul di Cairo, Fez, Cardoba dan di kota-kota muslim lainnya.³ Universitas Al-Azhar di Cairo adalah universitas tertua yang ada di dunia hingga dewasa ini. Selanjutnya, kata Standwood, sejak abad ketiga belas berbagai universitas tumbuh di seluruh Eropa; Bologna, Padua, Paris dan Oxford.

Kajian Stanwood di atas sejalan dengan temuan Oemar Amin Hoesin⁴ yang mengatakan bahwa universitas pertama di dunia adalah Nizamiyah University di Bagdad yang didirikan pada tahun 1076 oleh

¹ M. Enoch Markum, *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 23.

² Standwood Cobb, *Islamic Contributions to Civilization* (Washington DC: Avalon Press, 1963), hlm. 57

³ Istilah 'universitas' (*al-jamia'ah*), yang mempunyai pengertian sebagai lembaga pendidikan tinggi, pertama kali muncul pada akhir abad ke-14 M. Kemunculan istilah itu diawali oleh begitu menjamurnya lembaga pendidikan di Eropa. Setidaknya ada tiga lembaga pendidikan di Eropa yang mempunyai andil besar bagi munculnya istilah 'universitas', yaitu Lembaga Pendidikan Kedokteran (*Tibb*) di Salimo yang berdiri tahun 1000 M. Lembaga Pendidikan Hukum (*Qanun*) di Bologna yang berdiri tahun 1150 M., dan Lembaga Pendidikan Ketuhanan (*Lahut*) di Paris yang berdiri tahun 1168 M. Setelah mengalami perkembangan yang mengesankan, ketiga lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan yang disebut dengan universitas. Hingga akhir abad ke-15, di Eropa terdapat sekitar 70 universitas. Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam* (Jakarta: al-Husna, 1985), hlm. 93.

⁴ Oemar Amin Hoesin. *Kultur Islam*, Terj. H. Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 19.

Perdana Menteri Nizamul Mulk yang melengkapi “Darul Hikmah” yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma’mun Ibn Harun Al-Rasyid tahun 830 M. Lembaga pendidikan tinggi ini merupakan lembaga pendidikan tinggi di dunia pertama kalinya yang mempelajari berbagai ilmu pengetahuan secara sistematis dan modern. Pada zamannya, PTI ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pusat penterjemahan dan penerbitan, perpustakaan, laboratorium, dan observasi.⁵ Kenyataan ini dalam pandangan ibn Hazm sebagaimana yang dikutip Mas’ud,⁶ menunjukkan bahwa pendidikan Islam ternyata tidak mengenal pendikotomian antara ilmu agama di satu sisi dan sains di sisi lain. Ibn Hazm yang merupakan tokoh Spanyol ini memperkenalkan ilmu-ilmu dasar Islam (al-Qur’an, Tauhid, Syari’ah Islam) pada anak-anak usia lima tahun sebagai landasan utama dan kemudian diikuti dengan ilmu alam, matematika, ilmu bumi, sejarah dan sebagainya sesuai dengan perkembangan usia dan minat anaknya.

Sebuah Kilasan Sejarah

Untuk memahami bagaimana sejarah pendidikan tinggi Islam nondikotomik pada abad pertengahan ada beberapa contoh yang bisa diketengahkan yaitu: *Pertama*, Universitas al-Azhar di Mesir. Universitas ini didirikan oleh Jauhar al-Siqili, Panglima Perang Khalifah al-Mu’iz li Dinillah pada tahun 970 M. Penamaan al-Azhar dinisbatkan pada Fatimah al-Zahra, puteri Rasulullah yang mempunyai hubungan nasab dengan Bani Fathimiyyah. Pada mulanya, universitas al-Azhar adalah lembaga pendidikan masjid. Pada tahun 988 M/378 H, Ibn Kals melakukan inovasi atas lembaga tersebut sehingga berubah menjadi lembaga pendidikan yang lebih

⁵Setelah Universitas ini berdiri, berkembang pula beberapa universitas seperti Universitas Nishapur, Damaskus, Kairo, Kardova dan lain-lain yang kemudian ditiru oleh Eropa. Tetapi sumber ilmu tetap berada di tangan Universitas Islam karena pelajar-pelajar Kristen tetap banyak belajar di universitas Islam (Azra, “Kemajuan Peradaban dan Intelektual Islam”, dalam Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 55.

⁶ Abdurahman Mas’ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 7.

sistematis dan terprogram. Hingga sekarang, al-Azhar menjadi 'mercusuar' bagi semua universitas Islam di dunia.

Pada awal perkembangannya, Universitas Al-Azhar sempat dijadikan lembaga propaganda oleh kelompok Syi'ah guna mempertahankan doktrin teologisnya. Setelah mengalami perubahan yang revolusioner, Universitas al-Azhar kemudian dikuasai oleh kelompok Sunni. Keadaan ini terus bertahan hingga sekarang. Titik balik perubahan revolusioner tersebut terjadi ketika Muhammad Ibn 'Abdullah memimpin universitas tersebut. Pada masa itu, sistem Syaikh al-Azhar kemudian dikenalkan. Dengan sistem inilah Universitas al-Azhar kemudian terbebas dari dominasi para penguasa dan dari pengaruh politik.⁷

Kedua, Universitas al-Zaitunah di Tunis. Universitas al-Zaitunah dibangun pertama kali pada tahun 732 M/114 H oleh 'Abdullah Ibn Habhab. Kemudian, pembangunannya disempurnakan oleh Abu al-'Abbas Muhammad Ibn Aghlab pada masa pemerintahan al-Mu'tasim. Universitas yang terletak di tengah kota Tunis ini berperan amat strategis bagi pengembangan keilmuan Islam.

Ketiga, Universitas al-Qarawiyyin di Fez. Universitas al-Qarawiyyin terletak di sisi barat, dan dapat dianggap sebagai tandingan bagi universitas al-Azhar yang berada di sisi timur. Para peneliti berpendapat bahwa Universitas al-Qarawiyyin merupakan universitas paling tua pada abad pertengahan.⁸ Pada perkembangan berikutnya, Universitas al-Qarawiyyin dikembangkan menjadi universitas Islam dengan model Barat, seperti halnya Universitas al-Zaitunah di Tunis.⁹ Kini universitas yang terletak di Fez itu dapat dipandang sebagai model bagi demokratisasi pendidikan di universitas Islam.

Keempat, Universitas Cordova di Andalusia. Universitas ini merupakan peninggalan yang paling cemerlang di antara warisan

⁷ Untuk informasi tentang peralihan al-Azhar dari dominasi paham Syi'ah kepada paham Sunni, baca misalnya Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1977), 280, dan Seyyed Hossein Nasr, *Sains dan Peradaban di Dalam Islam*, terj. J. Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 54.

⁸ Ibid., hlm. 54.

⁹ Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 126.

Daulah Umayyah di Andalusia adalah Masjid Jami' Cordova. Masjid itu dibangun tahun 786 M/170 H. oleh 'Abd al-Rahman al-Dakhil. Kemudian, secara bertahap, masjid tersebut berkembang menjadi universitas yang megah.¹⁰ Namun, kemegahan itu hilang setelah Raja Ferdinando III mengubahnya menjadi gereja pada tahun 1236 M.¹¹ Perubahan secara paksa itu tentunya merupakan peristiwa yang paling menyedihkan dalam sejarah pendidikan Islam.

Lepas dari kontroversi historik tentang pendidikan tinggi Islam di atas, yang jelas pada abad itu, ekistensi pendidikan tinggi Islam sudah diakui kemajuannya oleh dunia Eropa. Eropa pada saat itu sudah banyak mendapatkan keuntungan dari keberadaan universitas waktu itu. Mehdi Nakosteen,¹² yang menemukan bahwa pada abad pertengahan tersebut,¹³ prestasi umat Islam dalam bidang pendidikan, telah banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan kepada dunia Barat, kontribusi-kontribusi itu antara lain sebagai berikut:

1. Sepanjang abad ke-12 dan sebagian abad ke 13, karya-karya muslim dalam bidang filsafat, sains dan sebagainya telah diterjemah ke dalam bahasa Latin, khususnya dari Spanyol. Penerjemahan ini sungguh telah memperkaya kurikulum pendidikan dunia Barat, khususnya di Northwest Eropa.

¹⁰Menurut Hitti, kemegahan yang dimiliki Universitas Cordova melebihi kemegahan Madrasah Nizamiyyah di Baghdad dan Al-Azhar di Kairo. Baca Philip K. Hitti, *History of The Arabs from the Earliest Times to the Present* (New York: St. Martin's Press, 1968), hlm. 530.

¹¹Akbar S. Ahmed, *Living Islam: Tamsya Budaya Menyusuri Samarkand hingga Stornoway*, terj. Pangestuningsih (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 114-115.

¹² Mehdi Nakosteen, *History of Islamic Origins of Western Education* (Colorado, 1964), hlm. 61-62.

¹³Selama abad pertengahan, dunia Islam belum menggunakan istilah universitas untuk menyebut lembaga pendidikan tinggi. Pada waktu itu dunia Islam masih menggunakan istilah *madrasah*. Ada perbedaan yang mendasar antara universitas dan madrasah pada awal penggunaan kedua istilah tersebut. *Pertama*, kata 'universitas' menunjuk pada komunitas sarjana dan mahasiswa, sedangkan kata 'madrasah' menunjuk pada bangunan tempat pendidikan tinggi. *Kedua*, universitas bersifat hirarkis dengan sistem control yang jelas, sedang madrasah bersifat individualis dengan control yang sangat lemah. *Ketiga*, izin mengajar di universitas dikeluarkan oleh suatu komite, sedangkan izin mengajar di madrasah diberikan oleh seorang syaikh.

2. Muslim telah memberi sumbangan eksperimental mengenai metode-metode dan teori-teori sains ke dunia Barat
3. Sistem notasi dan desimal Arab dalam waktu yang sama dikenalkan ke dunia Barat
4. Karya-karya dalam bentuk terjemahan, khususnya dari Ibnu Sina dalam bidang kesehatan, dipakai sebagai teks di lembaga-lembaga pendidikan tinggi sampai pertengahan abad ke 17
5. Ilmuan-ilmuan muslim dengan karya-karya mereka telah merangsang kebangkitan Eropa dan memperkaya kebudayaan Romawi kuno serta literatur klasik yang pada gilirannya melahirkan *Renaissance*,
6. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan jauh sebelum Eropa bangkit, dalam bentuk ratusan madrasah, adalah pendahulu-pendahulu (*foorernners*) universtas-universitas dan *college* di Eropa,
7. Para ilmuwan muslim berhasil melestarikan pemikiran dan tradisi ilmiah Romawi-Persia sewaktu Eropa dalam kegelapan,
8. Sarjana-sarjana Eropa belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi dunia Islam dan mentransfer ilmu pengetahuan ke dunia Barat
9. Ilmuwan-ilmuwan muslim telah menyumbangkan pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi serta makanan ke Eropa. Kontribusi ini tidak terlepas dari tiga fungsi perguruan tinggi, yaitu sebagai pewaris kebudayaan, sebagai fasilitator bagi perkembangan individu; dan sebagai pelayanan umum.¹⁴

Mengapa kontribusi universitas Islam saat itu begitu besar dalam mengembangkan peradaban Barat? Ini karena pada puncak peradaban Islam, empat abad pertama sejak munculnya agama ini (7-11 M) tidak ditemukan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pengaruh perdana Yunani Kuno, *first wave of Hellenism*, tidak pernah disambut dengan antagonisme dalam empat abad pertama peradaban Islam. Hal ini, jelas Mas'ud, karena ajaran Islam tidak memberikan tempat pada pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam.¹⁵ Hal ini, jelas Mas'ud, karena ajaran Islam tidak memberikan

¹⁴Langgung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, hlm. 93-94.

¹⁵Mas'ud, *Mengagas Format Pendidikan Nondikotomik*, hlm. 5.

tempat pada pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam.

Selanjutnya, kajian Charles Michail Stanton, dalam hasil penelitian yang sudah dibukukan berjudul *Higher Learning Islam, The Clasical Period*. Dalam kajian ini, Stanton banyak mengulas tentang sejarah pendidikan tinggi dalam Islam. Dia menyebut madrasah sebagai *the institution of higher learning* (lembaga keilmuan pendidikan tinggi) pertama yang didirikan oleh Wazir Nizhamiyyah pada tahun 1064 yang selanjutnya dikenal sebagai Madrasah Nizham al-Mulk.¹⁶ Penelitian ini memang menemukan beberapa model pendidikan tinggi seperti Kuttab, Majlis Khalaqah dan juga berupa perpustakaan masjid/istana dan lain-lain, yang dalam katagorisasi Stanton disebutkan sebagai pendidikan tinggi. Penelitian ini, setidaknya dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk memahami sisi historis konsepsi pendidikan tinggi Islam.

Satu-satunya, *prior research on topic* selanjutnya yang agak relevan dengan kajian ini adalah studi David L. Kirp yang mengkaji tentang perubahan pendidikan tinggi di Universitas Arcadia. Dalam penelitiannya yang berjudul, *Shakespeare, Einstein and the Bottom Line, The Marketing of High Education*, ini, bisa disebut sebagai salah satu kajian mendalam tentang perubahan pendidikan tinggi baik secara konseptual, institusional dan budaya pendidikannya. Dalam penelitiannya ini, David menjelaskan bahwa Universitas Arcadia (berdiri pada tahun 1853) yang dulunya adalah *Beaver College (Woman's Liberal Arts College)* yang sasaran pasarnya adalah kaum

¹⁶Jika ini diartikan sama dengan “universitas” sebagai universitas litterarum atau universitas magistrorum yakni lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan penyelidikan bebas berdasarkan nalar, maka, pandangan itu agaknya keliru. Azyumardi Azra, dalam tulisannya tentang *Pendidikan Tinggi Islam dan Kemauan Sains*, menyebutkan bahwa dalam tradisi pendidikan Islam, institusi pendidikan tinggi lebih dikenal dengan sebutan *al-jamiah*. Al-Jamiah yang muncul paling awal dengan pretensi sebagai “lembaga pendidikan tinggi” adalah al-Azhar di Kairo, Zaituna di Tunis dan Qawariyyin di Fez. Walaupun begitu, menurut Azra, walaupun orang Barat menyebutnya sebagai “universitas-universitas”, namun secara kelembagaan lebih tepat disebut sebagai “madrasah tinggi” ketimbang “universitas”. Lihat Azyumardi Azra, “Pendidikan Tinggi dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)” dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994), hlm. 196.

perempuan citranya semakin merosot dengan tampilan kampus yang kusam dan ornamentalis serta memiliki kepemimpinan otoriter. Namun, setelah melakukan perubahan konsep, institusional dan budaya pendidikan dengan melakukan reposisi segmen pasarnya, menerima mahasiswa laki-laki, membuka jurusan-jurusan baru hingga merubah namanya menjadi Arcadia University, maka sejak tahun 1992 universitas ini bisa berubah dan tampil lebih agresif.¹⁷

Penelitian Udin tentang Internalisasi Budaya Organisasi dalam Inovasi pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus STAIN Malang) ditemukan bahwa (1) budaya malu, kerja keras, disiplin dengan nilai-nilai yang dikembangkan *fastabiqul khairât, jihâd, uswah* dan kebersamaan; (2) Internalisasi budaya organisasi dilakukan, sosialisasi uswah dan perilaku ketaqwaan melalui kegiatan ritual dan simbol-simbol yang diyakini, (3) Inovasi fisik dan non-fisik yang didorong oleh nilai-nilai organisasi.¹⁸

Sebagai pendukung, hasil observasi mendalam Rhenald Kasali juga sangat penting untuk melihat bagaimana perubahan budaya di perguruan tinggi. Kasali melihat secara khusus bagaimana reformasi budaya yang terjadi di Universitas Indonesia (UI). Dalam kajiannya dia menyebutkan bahwa UI sudah mengadopsi nilai-nilai baru dan teknologi baru tetapi tidak bisa menghilangkan begitu saja nilai-nilai lamanya dan sangat menyulitkan bagi pengembangan pendidikan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan Usman Khatib Warsa di mana UI telah melakukan perubahan struktural sehingga secara organisasi UI telah berubah menjadi lebih dinamis tetapi untuk melakukan transformasi birokrasi universitas menjadi *corporate university* perubahan struktural tidak cukup tanpa dibarengi dengan perubahan budaya.¹⁹

Kajian khusus yang memberikan kajian kritis terhadap perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN adalah kajian Eka Putra Wirman tentang Konversi IAIN menjadi UIN: Tuntutan Pragmatis atau Epistemologis? Dalam kajian ini Eka mengakui bahwa baik IAIN *With Wider Mandate*

¹⁷ Rhenald Kasali, *Change !* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 75.

¹⁸ Udin, "Internalisasi Budaya Organisasi dalam Inovasi Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus STAIN Malang)" *Tesis* (Program Pascasarjana Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. STAIN Malang, 2001) hlm. 83-84.

¹⁹ Kasali, *Change!*, hlm. 78-80.

maupun Konversi IAIN menjadi UIN diharapkan bisa menjadi solusi pamungkas terhadap rendahnya kualitas *output* PTAI di Indonesia dan akan menjadikan proses aktualisasi Tridharma PTAI lebih akurat dan akuntabel sehingga dapat mendongkrak mutu lulusan dengan menerapkan *quality management system* secara konsisten. Namun, kajian ini juga Eka melihat bahwa dengan konversi menjadi UIN dapat mengancam keberlangsungan ilmu-ilmu keislaman (*'ulum al-dîn*).

Di samping itu, salah satu penelitian yang layak diajukan dalam hal ini adalah kajian Azyumardi Azra yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan atau pembaharuan pendidikan, baik yang dilancarkan di Turki maupun di Mesir diawali dengan pembaharuan pemikiran dan pespektif intelektual, khususnya melalui penerjemahan sejumlah literatur Eropa yang dipandang esensial ke dalam bahasa Arab atau melalui pengiriman duta dan mahasiswa yang ditugaskan mengamati pendidikan Eropa yang merupakan salah satu “rahasia” keunggulan mereka. Pembaharuan pendidikan tidak langsung diarahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sendiri (perubahan kelembagaan).²⁰

Sebagaimana lazimnya setiap pembaharuan, apa yang dilakukan oleh cendekiwaan muslim pada saat itu, baik dalam pembaharuan pemikiran maupun pembaharuan pendidikan tentunya mendapatkan resistensi dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam. Bayard Dodge²¹ mencontohkan Universitas al-Azhar Mesir yang didominasi oleh para ulama konservatif yang dominan al-Azhar menolak sejumlah gagasan pembaharuan pendidikan yang ditawarkan dan ingin diterapkan tokoh semacam Rifa'ah al-Tahtawi. Bahkan Muhammad Abduh dalam posisi sebagai anggota Majelis Tinggi al-Azhar hanya mampu secara parsial melakukan pembaharuan terhadap Azhar dengan memasukkan mata kuliah matematika, al-Jabar, ilmu ukur dan ilmu bumi ke dalam kurikulum. Tetapi

²⁰Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2006), hlm. 40-41.

²¹Bayard Dodge, *Al-Azhar: A Mellinium of Muslim Learning* (Washington DC: American International Printing, 1961), hlm. 125-87.

pembaharuan ini dibatalkan oleh Salim al-Busyairi, Rektor ke-25 al-Azhar.

Dalam perkembangan sejarah lebih lanjut, Al-Azhar bisa berubah setelah rezim militer Gamal Abd al-Nasir pada tahun 1961 menghapuskan otonomi al-Azhar dan menempatkan universitas ini di bawah kekuasaannya. Setelah itu pembaruan besar-besaran dapat dilancarkan dengan menambahkan sejumlah fakultas baru yang melampaui tradisi seperti Fakultas Kedokteran, Teknik, Pertanian, Ekonomi dan Sastra. Pembaharuan-pembaharuan ini dimaksudkan untuk mengadaptasikan nilai atau ajaran Islam dengan perubahan.

Dampak Perubahan Status Perguruan Tinggi Islam

Perguruan tinggi Islam di Indonesia, sebenarnya sudah ada indikasi untuk mengarah ke masa-masa kejayaan Islam dengan mencoba meretas pendidikan tinggi yang memiliki wawasan integratif. Beberapa penelitian yang melihat bagaimana model pendidikan seperti itu telah dilakukan. Seperti penelitian Imam Suprayogo yang mengkaji tentang *Hubungan antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perguruan tinggi dan pesantren sebenarnya memiliki akar budaya yang sama, sebagai lembaga keilmuan/pendidikan, hanya berbeda dalam lingkungannya. Jika keduanya bisa diintegrasikan atau dipadukan dalam konteks yang integral maka model atau sistem pendidikannya akan menjadi alternatif pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia seperti halnya Perguruan Tinggi Pesantren. Penelitian ini cukup baik untuk memberikan dasar-dasar pemahaman tentang model kelembagaan pendidikan tinggi alternatif.

Lalu bagaimana model-model pendidikan tinggi Islam yang berkembang saat ini? Berbagai model pendidikan tinggi ditemukan dalam penelitian Azyumardi Azra tentang Model Pendidikan Tinggi Islam (Studi di Universitas al-Azhar Mesir, Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia dan PTAIS di Indonesia) ditemukan bahwa; Pertama, Model Universitas al-Azhar Mesir, di mana fakultas-fakultas agama berdiri berdampingan dengan fakultas-fakultas umum. Fakultas-fakultas ini cenderung terpisah satu sama lain, walaupun tetap di bawah satu payung. Kecenderungan dari model ini adalah fakultas-fakultas umum menjadi fakultas-fakultas favorit, sementara fakultas-

fakultas agama menjadi “fakultas-fakultas pilihan kedua”. Kedua, model Pendidikan Tinggi Islam Swasta (PTIS) yang mempunyai fakultas agama berdiri terpisah. Model ini, fakultas-fakultas umum berdampingan dengan fakultas agama yang terdiri dari beberapa jurusan seperti Jurusan Tarbiyah dan Syari’ah. Dalam model ini, subyek-subyek agama menjadi perifer, karena hanya ada satu atau dua fakultas agama. Ketiga, Model Universitas Islam Antarbangsa (UIA) Kuala Lumpur. Dalam model ini, ilmu-ilmu agama dibagi menjadi “*revealed knowledge*”, ilmu perolehan yang selanjutnya diterjemahkan menjadi fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan umum, seperti teknik, kedokteran, ekonomi dan sebagainya. Bidang-bidang ini selain “diislamisasikan”, ketika dijabarkan ke dalam kurikulum, juga dilengkapi dengan subyek-subyek keislaman.

Dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan, kajian tentang model-model pembaharuan pendidikan tinggi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Azyumardi tidak banyak terdapat dalam literatur. Lebih-lebih yang benar-benar sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk melacak *prior research on topic* atau hasil-hasil penelitian terdahulu tentang topik ini peneliti merasa kesulitan. Namun demikian, setidaknya ada beberapa penelitian tentang pendidikan tinggi Islam yang bisa ditelusuri. Semangat pembaharuan pendidikan tinggi seperti itu merambah dunia Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) baik yang berbentuk IAIN maupun yang berbentuk STAIN di Indonesia. Perubahan yang mencolok adalah pada aspek konseptual dan institusional, dengan harapan terjadi juga perubahan budaya pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan.

Secara konseptual, menurut Husni Rahim gagasan-gagasan baru tentang pengembangan pendidikan Islam, khususnya IAIN, yang muncul pada tahun-tahun pertama dekade ini merupakan suatu usaha untuk menghindari kebuntuan pembaharuan yang sudah berlangsung sejak pertengahan dekade 1970-an yang memprihatinkan banyak kalangan dimana kajian Islam di perguruan tinggi Islam tampaknya berhenti pada dasar-dasar rasionalisme dan komparatifisme yang sudah diletakkan oleh tokoh-tokoh pembaharuan seperti Harun Nasution dan Mukti Ali. Belakangan ini, muncul kebutuhan dan

tuntutan baru yang kompleks sehingga memerlukan usaha-usaha pembenahan akademik lebih lanjut.²²

Lebih jelas Husni Rahim menegaskan bahwa ada dua gagasan besar pengembangan pendidikan tinggi Islam yang muncul pada dekade 1990-an adalah menjadikan IAIN sebagai pusat keunggulan studi keislaman (*the center of excellence of Islamic studies*) dan gagasan yang berskala besar yaitu mengembangkan IAIN menjadi universitas,²³ yaitu *Universitas Islam Negeri* (UIN). Gagasan besar kedua ini muncul terkait dengan berkembangnya isu perlunya islamisasi ilmu pengetahuan dalam rangka menutupi kehampaan mental dan spiritual dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dengan berubah menjadi universitas kemungkinan pengembangan disiplin-disiplin ilmu umum dapat dilakukan dan dapat dipadukan dengan tradisi kajian Islam yang sudah berkembang sekaligus sebagai upaya menolong IAIN dari keterasingan yang lebih jauh dalam tata pergaulan dunia pendidikan tinggi.²⁴

Gagasan-gagasan besar yang masih bersifat wacana itu, tentunya tidak akan pernah usai dengan menggelar berbagai seminar, workshop atau konferensi tingkat dunia sekalipun jika tidak ada usaha-usaha untuk mempertegas, mempertajam dan keberanian dalam memperbaharui pendidikan tinggi Islam secara lebih nyata. Oleh karena itu, gagasan-gagasan perubahan kelembagaan PTAIN yang sejak lama diwacanakan mulai ditabuh pada tahun 1997 dimana terjadi dua *perubahan institusi-kelembagaan* yang cukup signifikan dalam tubuh PTAIN.

Pertama adalah perubahan status dari fakultas cabang di lingkungan IAIN menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) melalui Surat Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997.

²² Husni Rahim, "UIN dan Tantangan Meretas Dikotomi Keilmuan", dalam Zainuddin (Ed) *Horizon Baru Pengemangan Pendidikan Islam* (Malang: UINMalang Press, 2004), hlm. 49-50.

²³ Dalam konteks ini, berubah menjadi universitas dianggap sebagai langkah yang prospektif dalam rangka mengaktualisasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan nyata. Karena kata universitas sangat berpengaruh terhadap pengkajian dan pengembangan keilmuan secara lebih luas dengan membuka berbagai bidang ilmu yang beragam dan bersifat universal. Lihat Yuhara Sukra, *Wawasan Harta Lunak Perguruan Tinggi di Indonesia* (Jakarta: Gunadarma, 2005). hlm. 127-128.

²⁴ Rahim, *UIN dan Tantangan Meretas Dikotomi Keilmuan*, hlm. 51.

Keputusan Presiden ini telah membuat sejarah monumental dimana pada saat yang sama 33 Fakultas Cabang IAIN menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri) yang diprakarsai oleh Dirjen Binbaga Islam yang saat itu dijabat oleh A. Malik Fadjar.²⁵ Perubahan kelembagaan seperti ini sebagai satu usaha untuk mendudukkan posisi perguruan tinggi pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan kehendak undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah menggariskan bahwa struktur perguruan tinggi yang benar adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan diploma, bukan fakultas cabang.

Kedua adalah dengan perubahan kelembagaan pendidikan tinggi dari IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan ini dimulai sejak alih status IAIN Syarif Hidayatullah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang berdasarkan Keputusan Presiden tentang Perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang nomor 50 tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004. Tidak hanya sampai tiga PTAIN ini saja, arus perubahan juga merebak ke tiga IAIN, yaitu IAIN Alauddin Makassar, IAIN Pekanbaru Riau dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pun ikut beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Kedua model perubahan institusional ini, perubahan fakultas cabang menjadi STAIN dan perubahan IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) setidaknya dapat menjadi jawaban bagi kegelisahan intelektual para cendekiawan maupun intelektual Islam sejak tahun 1970-an hingga tahun 1990-an yang menginginkan perubahan secara totalitas di tubuh pendidikan tinggi Islam. Oleh karena itu, A. Malik Fadjar menegaskan bahwa perubahan institusional ini bukan sekedar perubahan “papan nama”, tetapi

²⁵ A. Malik Fadjar, Barizi (Ed) *Holistika Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 35. Dalam buku ini Malik menyatakan bahwa perubahan ini tentunya merupakan kehendak undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah menggariskan bahwa struktur perguruan tinggi yang benar adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan diploma, bukan fakultas cabang.

diharapkan sebagai salah satu model “reintegrasi keilmuan” yang menunjuk pada satu bentuk pengembangan, peningkatan, dan pemantapan status akademik yang lebih profesional. Sehingga UIN bisa diprediksikan dapat menjadi model sistem pendidikan tinggi Islam yang memiliki “kualitas tinggi” dibanding dengan PTN/PTS lainnya.²⁶ Baik perubahan fakultas cabang menjadi STAIN maupun perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN sesungguhnya memiliki satu misi yaitu memperluas kawasan dan kajian keilmuan di perguruan tinggi Islam. Awalnya, beberapa STAIN di Indonesia diberi kewenangan untuk membuka beberapa program studi umum berdasarkan atas Surat Keputusan Dirjen Binbaga Islam.²⁷

Namun, keleluasaan untuk membuka program studi umum sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa STAIN di Indonesia saat itu, mendapat hambatan yang cukup menyulitkan karena menyangkut pembidangan ilmu. Sebagai perguruan tinggi agama STAIN menurut pembidangan ilmu yang ditetapkan oleh LIPI hanya boleh membuka jurusan-jurusan yang masuk dalam katagori ilmu agama²⁸ yang tercermin dalam pembagian fakultas/Jurusan yang didasarkan pada pembidangan Ilmu Agama Islam tersebut. Adanya rambu-rambu dari LIPI ini, diakui atau tidak, telah menghambat sekaligus membatasi ruang gerak pengembangan pendidikan tinggi Islam khususnya dalam pengembangan program studi umum yang sesungguhnya merupakan satu kesatuan dari ajaran Islam.

²⁶ Ibid., hlm. 35-36.

²⁷ Untuk memberikan paradigma baru tentang keluasan ilmu yang bisa dikembangkan oleh STAIN, A. Malik Fadjar, sewaktu menjadi Dirjen Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E/107/1998 tanggal 13 Mei 1998 tentang penyelenggaraan Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Tadris Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Diploma II(D-2) Pendidikan Agama Islam, Psikologi, Ekonomi (Muamalah) dan Program Studi Bahasa Arab dan Inggris. Lihat Ibid., hlm. 37.

²⁸ LIPI mengkatagorikan Ilmu Agama Islam menjadi beberapa bagian, Sumber-sumber ajaran Islam, Pemikiran Dasar Islam, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Sejarah dan Peraaban Islam, Bahasa dan Sastra Islam, Dakwah Islam dan Perkembangan Modern/Pembaharuan dalam Islam. Lihat, Iskandar Zulkarnaen dan Zarkasji Abdul Salam (ed), *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), hlm. 89-93.

Oleh karena itu, gagasan mengubah status baik dari IAIN atau STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) sebenarnya merupakan alternatif bagi pengembangan /gagasan untuk mengembangkan keilmuan Islam secara lebih luas. Karena, untuk mengembangkan ilmu sebagai mana tuntunan ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, sekaligus melalui penelitian ilmiah, belum cukup jika terwadahi dalam lembaga pendidikan berupa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang mengembangkan keilmuan yang sejenis, ilmu agama Islam secara normatif tanpa bisa menjangkau dimensi keilmuan (dimensi *kauniyah*) lainnya yang justru sangat diperhatikan oleh al-Qur'an dan al-Hadits.²⁹

Di samping itu, ada semacam kerinduan terhadap kejayaan Islam terdahulu, bahwa ilmuwan Islam selain mereka itu mendalami ajaran agamanya, al-Qur'an dan hadits, juga memiliki keahlian ilmu-ilmu modern, seperti biologi, fisika, matematika, psikologi, sosiologi dan lain-lain sebagaimana yang didirikan dan dikembangkan oleh kaum muslimin pada abad ke 19 baik di Baghdad, Cairo, Fez dan Cordoba.³⁰ Sehingga pada masa itu, tidak terjadi dikotomi dalam melihat ilmu pengetahuan sebagaimana yang terlihat pada saat ini. Karena pada saat itu ada pemikiran bahwa ajaran Islam menuntun umatnya, agar mempelajari ayat-ayat *qauliyah* yang bersumber al-Qur'an dan hadits sekaligus ayat-ayat *kauniyah* yang dikembangkan melalui observasi, eksperimen dan penalaran logis.³¹ Untuk itulah, jika tetap bertahan dengan kelembagaan seperti sekarang ini (IAIN/STAIN) yang hanya diberi kewenangan untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama sesuai dengan ketentuan LIPI, tentunya akan mendapat hambatan dalam melakukan transformasi maupun eksplorasi beragam bidang keilmuan.

Harus dipahami bahwa derasnya arus perubahan konsep maupun institusi, IAIN/STAIN menjadi UIN, lebih banyak didorong oleh

²⁹ Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Budaya dan Seni pada Perguruan Tinggi* (Malang, UINMalang Press, 2006), hlm. 9-10.

³⁰ Juhaya S. Praja, "Paradigma Pengembangan Universitas Islam", dalam Zainuddin dkk (Horizon Pengembangan Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2004), hlm. 67-68.

³¹ Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, hlm. 15.

adanya pemikiran baru yang mencoba melakukan rekonseptualisasi terhadap pendidikan tinggi Islam yang ideal yaitu sebagai pusat transmisi dan transformasi keilmuan berbasis Islam³² yang mampu mengemban misi perguruan tinggi sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Jose Ortega yang menjelaskan tugas pokok perguruan tinggi yaitu *transmission of culture, the teaching of profession and scientific research and training of new scientists*.³³

Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah dan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) bersama dengan lima (5) IAIN di Indonesia merupakan suatu hasil usaha keras yang dilakukan oleh para aktor perubahan baik dalam lingkup pimpinan teras Departemen Agama maupun para aktor yang bergumul di kedua kampus ini. Hanya saja, IAIN Syarif Hidayatullah yang berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 merupakan sebuah gerakan implementasi dari diskusi yang sangat panjang yang dilakukan oleh beberapa cendekiawan Muslim yang menginginkan kembalinya kecemerlangan peradaban Islam yang dapat dijadikan sebagai cermin bagi pengembangan peradaban Indonesia. Bagi mereka, merubah IAIN menjadi Universitas Islam Negeri merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk meraih peradaban Islam tertinggi.³⁴ Sehingga, berdasarkan study kelayakan baik secara akademik maupun kelembagaan, IAIN Syarif Hidayatullah sebagai *pilot project* bagi pengembangan IAIN/STAIN menjadi UIN. Berbeda dengan UIN Jakarta, sejak berubah dari Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) perguruan tinggi ini sangat konsen dan progresif untuk mengembangkan diri menjadi universitas. Ini terlihat jelas dalam Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang yang menetapkan pada tahun 2004 berubah menjadi universitas.³⁵

³²Ibid., hlm. 17.

³³Ortega Y. Gaseet, *Mission of The University* (New York: The Norton Library, 1966), hlm. 43.

³⁴Atho' Mundzhar, *IAIN menjadi UIN, Kenapa Tidak?* Majalah Tarbiyah, No. 37 1995, IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang.

³⁵Renstra STAIN Malang, 1998.

Dengan demikian, perubahan menjadi UIN ini sudah didesain sedemikian rupa berdasarkan pemikiran yang matang dan dibarengi dengan usaha dan perjuangan keras oleh aktor dan segenap perangkat pendukung lainnya. Oleh karena itu, jika dibanding dengan UIN Jakarta, tampaknya UIN Malang telah lebih dulu menyiapkan segenap perangkat-perangkat yang dibutuhkan baik secara akademik (pembukaan program studi), fasilitas fisik dan sumber daya manusia. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk diteliti. Lebih-lebih, dalam perkembangannya lebih lanjut selama ini UIN Malang dianggap memiliki ciri-ciri unik yang dikembangkan, dan mungkin tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya.

Belajar dari Pengalaman UIN Malang dan UIN Jakarta

Bagaimana teori perubahan melihat persoalan ini? Dilihat dari perspektif perubahan, perubahan-perubahan yang terjadi ditubuh Departemen Agama RI, khususnya dalam menata dan menetapkan kebijakan pada perubahan pendidikan tinggi Islam, selama ini, sesungguhnya tidak lepas dari peran sentral dan strategis orang besar atau *great individu* yang menjadi agen perubahannya melalui gagasan dan pemikiran besarnya. Orang-orang besar seperti ini, menurut Piotr Sztompka, dengan mengutip pendapat Dahrendorf, bisa menjadi agen pengubah bagi lembaga atau institusi karena kualitas pribadinya yang khas seperti pengetahuannya luas, kecakapan, bakat, ketrampilan, kekuatan fisik, kecerdikan dan memiliki kharisma. Dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya itu, ia mampu bertindak mewakili orang lain, atas nama mereka atau untuk kepentingan mereka yang selanjutnya menjadi suatu gerakan pembaharuan.³⁶

Seperti gagasan pembaharuan atau perubahan pendidikan tinggi Islam pertama kalinya yang berupa Sekolah Tinggi Islam yang digagas oleh M. Hatta, Sutiman dan M. Nasir adalah tokoh-tokoh nasional yang memiliki integritas dan komitmen yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan Islam. Pada zamannya, mereka merupakan tokoh-tokoh yang kharismatik sehingga setiap gagasan dan pikirannya sering menjadi kebijakan. Ini pula yang selanjutnya

³⁶Piotr Sztompka, *The Sosiologi of Social Change*, Terj. Alimandan (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 306.

diikuti oleh beberapa pejabat di Departemen Agama seperti Mukti Ali,³⁷ Alamsyah Ratuperwiranegara dan Munawir Sjadzali,³⁸ Malik Fadjar³⁹ hingga Said Aqil al-Munawar. Makanya, adagium yang menyatakan setiap ganti menteri ganti kebijakan menjadi benar dalam perspektif ini. Oleh karena itu, setiap perubahan sudah pasti ada *great individu* yang menyuarakannya yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi gerakan pembaharuan.

Perubahan yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang maupun di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, sesungguhnya tidak lepas dari peran sentral *great individu*-nya yang memiliki ide, gagasan dan pandangan dunia pendidikan tinggi yang sangat tajam dan berwawasan ke depan dengan menerapkan beberapa bentuk strategi perubahan untuk mencapai tujuannya. Di UIN Malang, tokoh pembaharuannya direfresentasikan oleh H. Imam Suprayogo⁴⁰ dan di UIN Jakarta direpresentasikan oleh Azyumardi Azra.⁴¹

³⁷Selama menjadi Menteri Agama (1971-1978) pernah membuat kebijakan penting, yakni kebijakan rasionalisasi untuk menutup sebagian besar IAIN-IAIN yang ada ditempat terpencil berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Rektor IAIN se-Indonesia di Bandung yang diikuti dengan Instruksi Ditjen Bimas Islam No.D.VI/Ed/166/73 dengan alasan yang pragmatis, peningkatan mutu dan tersisa 13 IAIN yang diberi izin operasional. Lihat Ali Riyadi, *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Al-Ruzz, 2005), hlm. 138-139.

³⁸ Pada masa Alamsyah Ratuperwiranegara menjadi Menteri Agama (1979-1983), modernisasi IAIN terus bergulir dengan kebijakan pembangunan program pascasarjana dan kerjasama dengan universitas umum. Hal ini diikuti pula dengan gerakan Munawir Sjadzali (1983-1993) yang sukses memposisikan IAIN setara dengan perguruan tinggi negeri lainnya seperti gelar akademik, ijazah dan pada zamannya berhasil membuka Program Pascasarjana (S2-S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lihat Ibid., hlm. 141.

³⁹Malik Fadjar yang menjabat sebagai Menteri Agama (1998-1999) juga dikenal dengan kebijakan beraninya dengan menjadikan Fakultas Cabang seluruh Indonesia yang berjumlah 33 buah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997. Lihat A. Barizi (ed), *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 37.

⁴⁰Imam Suprayogo lahir di Trenggalek 1950. Sebelum menjadi Rektor UIN Malang, pernah menjadi Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang yang mengantarkannya menjadi Wakil Ketua APTISI Jawa Timur selama 5 tahun.

⁴¹Azyumardi Azra lahir pada tanggal 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Sumatera Barat dari keluarga agamis. Ayahnya bernama bagindo Azikar secara akademik tidak berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Ia adalah sebagai tukang kayu,

Secara teoritik ada beberapa strategi perubahan yang diperankan aktor perubahan ini dalam melakukan penataan terhadap organisasi, universitas, ini yaitu; Pertama, strategi perubahan *incremental* dan radikal. Strategi perubahan *incremental* adalah suatu perubahan yang dilakukan secara kontinyu yang dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi ini dilakukan untuk menata secara sistematis bagian-bagian atau organ-organ organisasi yang membutuhkan sentuhan tangan dingin, khususnya dalam tata struktural-organisasi. Bersama dengan itu, aktor pengubah juga menggunakan strategi perubahan radikal karena apa yang dilakukan dalam membangun dan menata pendidikannya dilakukan dengan merubah refrensi, arah dan kebijakan organisasi dengan melakukan transformasi seluruh bagian institusi.⁴²

Dilihat dari fenomena yang berkembang, agaknya, strategi perubahan yang dominan dalam melakukan pengembangan UIN ini adalah perubahan radikal. Hal ini jelas sekali tampak pada penataan bidang struktural yang merubah struktur organisasi dari vertikal-fungsional menjadi matrix dan merubah struktur horizontal menjadi berorientasi pada *teamwork*. Sehingga perubahan semacam ini telah melahirkan terobosan baru berupa struktur yang benar-benar baru dengan proses atau konsep pendidikan yang sangat berbeda.

Kedua, Perubahan antisipatif dan reaktif. Penggunaan perubahan radikal di atas, sesungguhnya dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu terjadi sehingga dituntut untuk melakukan perubahan. Maka dalam perspektif teori ini, seorang aktor perubahan dituntut penginderaan yang tajam (visi) bahkan pengendusan sebelum sebuah

pedagang kopra dan cengkeh, tetapi memiliki kemauan yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Secara finansial, kondisi keuangan keluarga Azyumardi termasuk pas-pasan, sehingga kurang memungkinkan untuk membiayai pendidikan, apalagi sampai jenjang pendidikan tinggi. Namun berkat kerja keras dan jerih payah ayahnya, dan ditambah dengan gaji ibunya, Ramlah yang berprofesi sebagai guru agama, Azyumardi sejak kecil mendapat kesempatan belajar, dan melalui ayahnya pula, ia belajar mencintai ilmu. Azikar dan Ramlah rupanya sadar betul bahwa mereka tidak dapat mewariskan dan membekali apa-apa kepada anak-anaknya, termasuk kepada Azyumardi, selain dorongan untuk menuntut ilmu pengetahuan, kini semua anak-anaknya bisa menjadi sarjana.

⁴²Kasali, *Change!*, hlm. 80.

kejadian besar meledak di depan mata.⁴³ Ketajaman dan kejelian aktor dalam hal ini tidak lepas dari pergaulannya yang intens dengan beberapa pelaku bahkan decesion maker pendidikan baik secara nasional maupun internasional di samping melakukan kajian-kajian dengan tenaga ahli. Tentu saja, dalam perspektif teori perubahan ini, bahwa segenap perubahan sulit terwujud apabila tidak didukung oleh (1) *change agency* yang kuat. Dalam hal ini adalah segenap kelompok-kelompok advokat (para konseptor perubahan), *backers* (orang-orang yang memback-up perubahan yang memberikan fasilitas bahkan dana bagi terwujudnya perubahan), administrator, yang mengatur adminsitasi perubahan yang terdiri atas staf-staf yang menghayati setiap langkah perubahan hingga para consultan atau teknisi yang secara moral terus-menerus mendorong terjadinya perubahan. Di samping itu harus ada (2) *Supporters* yang terdiri atas kelompok-kelompok pekerja aktif (*workers*) yang setiap saat selalu menyediakan diri untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan rencana perubahan dan para donor atau penyumbang fasilitas atau dana tetapi tidak aktif dalam gerakan perubahan. Yang paling vital adalah (3) *channel* yaitu sekelompok orang yang selalu menyalurkan gagasan dan pemikiran perubahan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronika. Peran mereka sangat besar dalam melakukan sosialisasi gagasan dan pemikiran perubahan.⁴⁴ Lebih-lebih, setiap perubahan selalu muncul resistensi dari individu maupun kelompok yang menurut teori perubahan, disebabkan oleh beberapa hal seperti kebiasaan, keamanan, ekonomi, ketakutan atas ketidaktahuan, proses informasi selektif.⁴⁵ Untuk menghadapi penolakan terhadap individu maupun kelompok anti perubahan itulah, maka pendekatan Kotter & Schleinger patut dipertimbangkan dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan melalui komunikasi, partisipasi, fasilitas, negosiasi dan manipulasi serta paksaan.⁴⁶

⁴³ Ibid., hlm. 93.

⁴⁴ Muhaimin, *Pendidikan Agama dalam Perubahan Sosial* (Malang: UIN Malang Press, 2005), hlm. 17.

⁴⁵ Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 121.

⁴⁶ J.P. Kottler, dan L.A. Schlesiger, *Choosing Strategy for Change* (Harvard Business Review, March-April), hlm. 106-114.

Teori-teori perubahan ini agaknya sangat relevan untuk mengkaji penelitian tentang perubahan di lembaga pendidikan tinggi ini agar penelitian ini lebih berisi. Terlebih lagi apabila disandingkan dengan transformasi nilai-nilai budaya pendidikan yang menjadi *maenstrem* perubahan yang terjadi. Dalam manajemen perubahan, Rhenald Kasali mengatakan akan terjadi transformasi nilai-nilai. Tanpa menyentuh dan melakukan transformasi nilai-nilai, manusia-manusia dalam suatu institusi akan tetap melakukan hal-hal sama dengan cara-cara sama seperti yang dilakukan di masa lalu.⁴⁷ Bahkan lebih dari itu, perubahan akan ditumpangi oleh nilai-nilai baru yang sama sekali tidak dikehendaki. Selama masa transisi sangat mungkin budaya suatu organisasi terkontaminasi oleh nilai-nilai yang datang, baik secara alamiah sebagai akibat dari proses transformasi itu sendiri maupun datang secara acak dari luar institusi.

Sebagai organisasi sosial, perubahan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi Islam juga tidak lepas dari penolakan atau resistensi baik yang bersifat personal maupun kelompok. Penolakan perubahan terhadap budaya pendidikan secara personal/individu banyak disebabkan oleh karakteristik manusiawi dasar seperti persepsi, kepribadian dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, Stephen P Robbins mengidentifikasi lima alasan mengapa individu menolak perubahan yaitu kebiasaan, keamanan, faktor ekonomi, rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui dan pengolahan informasi selektif.⁴⁸

Perubahan budaya setelah menjadi universitas tentu, cepat atau lambat, akan melahirkan dua karakteristik yaitu yang adaptif dengan perubahan dan yang kurang adaptif dengan perubahan itu sendiri. Namun jelas, dalam perspektif teori Bilgrami bahwa universitas akan benar-benar mempercepat proses perubahan, dalam rangka mendekatkan pendidikan itu kepada landasan spiritual, suatu tujuan yang tidak mudah dicapai hanya dengan membuka Fakultas Teologi (Usuludin) pada universitas atau memasukkan bidang studi (mata

⁴⁷Kasali, *Change!*, hlm. 272.

⁴⁸ Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi* (San Diego: San Diego State University, 2003), hlm. 768-769.

kuliah) itu ke dalam silabus kurikulum sekolah atau universitas yang bersangkutan.⁴⁹

Penutup

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan konsep pada kasus Universitas Islam Negeri sesungguhnya memiliki satu keinginan yang sama yaitu mewujudkan atau merealisasikan gagasan tentang integrasi ilmu, ilmu agama dan umum dalam rangka mengakhiri perdebatan wacana tentang dikotomi ilmu. UIN Jakarta dengan menggunakan paradigma integrasi ilmu dialogis dari Ian G Barbour. Sementara UIN Malang lebih memilih pendekatan Imam Al-Ghazali yang mengklasifikasikan ilmu menjadi Fardlu 'Ain dan fardlu Kifayah dengan metode "takwil" yang diambil dari ilmu-ilmu sosial.

Sebagai bentuk realisasi dari konsep integrasi yang dipilih, maka konsep institusi harus berubah dari institut atau sekolah tinggi menjadi universitas untuk menampung universalitas ilmu dalam Islam yang tidak mengenal dikotomi ilmu. Budaya pendidikan yang dikembangkan juga disesuaikan dengan budaya universitas. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Ahmed, Akbar S. *Living Islam: Tamsya Budaya Menyusuri Samarkand hingga Stornoway*, Terj. Pangestuningsih. Bandung: Mizan, 1997.
- Riyadi, Ali. *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Al-Ruzz, 2005.
- Asari, Hasan. *Menyingkap Zaman Keemasan*, Jakarta: Bulan Biuntang, 1999.
- Azra, Azyumardi. "Kemajuan Peradaban dan Intelektual Islam", dalam Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan*. Jakarta: Logos, 1998.

⁴⁹Bilgrami, *The Concept of Islamic University* (Cambridge: The Islamic Academy, 1985), hlm. 66.

- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2006.
- Bilgrami. *The Concept of Islamic University*. Cambridge: The Islamic Academy, 1985.
- Barizi, A. (ed), *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Cobb, Standwood. *Islamic Contributions to Civilization*. Washington DC: Avalon Press, 1963.
- Dodge, Bayard. *Al-Azhar: A Millinium of Muslim Learning*. Washington DC: American International Printing, 1961.
- Fadjar, A. Malik. Barizi (Ed) *Holistika Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Gaseet, Ortega Y. *Mission of The University*. New York: The Norton Library, 1966.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs from the Earliest Times to the Present*. New York: St. Martin's Press, 1968.
- Hosein, Oemar Amin. *Kultur Islam*. Terj. H. Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Kasali, Rhenald. *Change!*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kottler, J.P. & Schlesiger, L. A, *Choosing Strategy for Change*. (Harvard Busines Review, March-April).
- Langgulung, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Jakarta: al-Husna, 1985.
- Markum, M. Enoch. *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Mas'ud, Abdurahman. *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Muhaimin, *Pendidikan Agama dalam Perubahan Sosial*. Malang: UIN Malang Press, 2005.

- Mundzhar, Atho'. *IAIN menjadi UIN, Kenapa Tidak?* Majalah Tarbiyah, No. 37 1995, IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang.
- Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Orgins of Western Education*. Colorado, 1964.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Sains dan Peradababn di Dalam Islam*, terj. J. Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1997.
- Praja, Juhaya S. "Paradigma Pengembangan Universitas Islam", dalam Zainuddin, et.al. *Horizon Pengembangan Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2004.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1977.
- Rahim, Husni. "UIN dan Tantangan Meretas Dikotomi Keilmuan", dalam Zainuddin (Ed.) *Horizon Baru Pengemangan Pendidikan Islam*. Malang: UINMalang Press, 2004.
- Renstra STAIN Malang, 1998.
- Robbins, Stephen P. *Perilaku Organisasi*. San Diego: San Diego State University, 2003.
- Sukra, Yuhara. *Wawasan Harta Lunak Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Gunadarma, 2005.
- Suprayogo, Imam. *Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Budaya dan Seni pada Prguruan Tingi*. Malang: UINMalang Press, 2006.
- Sztompka, Piotr. *The Sosiologi of Social Change*. Terj. Alimandan, Jakarta: Prenada, 2005.
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Zulkarnaen, Iskandar dan Zarkasji Abdul Salam (ed), *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.